



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : PR 10.06/ Kep.04/ BPKPD/ 2022

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 900/ 166/ BPKPD/ 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021;
16. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Siangaparna
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : PR 10.06/ Kep.04/ BPKPD/ 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Tahun 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
TAHUN 2021

KETUA : **Drs. RONI A. SAHRONI, M.M**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

WAKIL KETUA : **Dr. RUBI AZHARA, S.STP, M.Si**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SEKRETARIS : **SHORRICHUDDHUHA, S.Sos**
Perencana Ahli Muda

ANGGOTA : **1. Rusy Laytifah Munggaran, SE**
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Taufik Gunawan, S.Sos
Pengelola Bahan Perencanaan
3. Verawati, SE
Perencana Ahli Pertama

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 198810081988031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : PR 10.06/ Kep.04/ BPKPD/ 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Tahun 2021

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2020

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : PR 10.06/ Kep.32/ BPKPD/ 2022
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 900/ 166/ BPKPD/ 2019
16. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/Kep.58/BPKPD/2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2021 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Siangaparna
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 dapat tersusun. Penyusunan LKIP BPKPD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selama Tahun 2021 baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan sebagai penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun yang akan datang.

Singaparna, Februari 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681003 198803 1 003





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
1 BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1-2
1.2 Struktur Organisasi	1-3
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	1-6
1.4 Isu Aktual.....	1-9
1.5 Sistematisasi LKIP	1-10
2 BAB II PERENCANAAN KERJA.....	2-1
2.1 Rencana Strategis	2-1
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021	2-1
2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	2-2
2.2 Tujuan.....	2-3
2.3 Sasaran.....	2-4
2.4 Indikator Kinerja Utama	2-7
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	2-12
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	2-13
3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	3-2
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	3-7
A) Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021.....	3-7
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	3-11
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	3-15
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	3-19

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 3-26

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 3-27

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 3-31

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 3-33

B) Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026..... 3-38

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.. 3-40

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3-44

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis..... 3-47

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 3-49

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 3-50

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 3-54

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 3-56

3.2 Realisasi Anggaran..... 3-61

4 BAB IV PENUTUP..... 4-1

DAFTAR ISI

Tabel	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021.....	XI
Tabel	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026.....	XII
Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana	1-7
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah BPKPD Tahun 2016-2021.....	2-5
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Jangka Menengah BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021.....	2-8
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-10
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021.....	2-12
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-13
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	2-14
Tabel 2.8	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2021.....	2-15
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	2-15
Tabel 2.10	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2021.....	2-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja 1.....	3-3
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja 2.....	3-3
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021).....	3-5
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 (Berdasarkan	

	RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026).....	3-6
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021).....	3-7
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021.....	3-11
Tabel 3.7	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.....	3-13
Tabel 3.8	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu...	3-15
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan dengan target jangka menengah.....	3-19
Tabel 3.10	Penetapan APBD.....	3-22
Tabel 3.11	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	3-26
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3-31
Tabel 3.13	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	3-33
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021).....	3-38
Tabel 3.15	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.....	3-40
Tabel 3.16	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu.....	3-44
Tabel 3.17	Perbandingan capaian Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.....	3-45
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah...	3-47
Tabel 3.19	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	3-49
Tabel 3.20	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	3-54
Tabel 3.21	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	3-56
Tabel 3.22	Realisasi Kinerja dan Anggaran (Berdasarkan IKU pada RENSTRA Tahun 2016-2021).....	3-62

Tabel 3.23 Realisasi Kinerja dan Anggaran (Berdasarkan
IKU pada RENSTRA Tahun 2021-2026..... 3-64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi..... 1-5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin	1-6
Grafik 3.1	Hasil Evaluasi SAKIP.....	3-21
Grafik 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3-24
Grafik 3.3	Pertumbuhan Pajak Daerah	3-25
Grafik 3.4	Perbandingan capaian Tahun 2021 Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-48
Grafik 3.5	Perbandingan capaian Tahun 2021 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-48
Grafik 3.6	Perbandingan capaian Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-48
Grafik 3.7	Perbandingan capaian Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-48



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian tujuan BPKPD yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Perubahan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan masa transisi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB III, Pasal 3, Ayat (2) disebutkan bahwa *“Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 menjadi bagian dari Renstra Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati”*. Sehingga RENSTRA BPKPD pun mengalami beberapa penyesuaian khususnya untuk penentuan tujuan organisasi agar kinerja BPKPD dapat lebih baik dan terarah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021, Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima”**. BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan,

penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, pelayanan pajak daerah, perencanaan dan pengembangan pendapatan asli daerah, dan unit pelaksana teknis.

Untuk menunjang tujuan strategis tersebut maka disusunlah sasaran strategis agar tujuan tersebut tercapai. Berdasarkan RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021, sasaran strategis BPKPD terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran, sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;
 - Hasil Evaluasi SAKIP;
 - Ketepatan waktu penyusunan APBD;
 - Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD;
 - Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel					
1.1	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	BB (76)	BB (79,87)	105,09
1.2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	100
1.3	Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100
1.4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	3	3	100
1.5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					101,02
Sasaran Strategis 2 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD					
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,03	100,04
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100,04
Sasaran Strategis 3 :					
Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah					
3.1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	4,99	7,97*	159,63
Rata Rata Pencapaian Sasaran					159,63
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					120,23

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

Sedangkan berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, sasaran strategis BPKPD terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.
- Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel;

- Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel;
- Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.
4. Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah
- Persentase pertumbuhan pajak daerah

Tabel
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	N/A	N/A	-
Rata Rata Pencapaian Sasaran					-
Sasaran Strategis 2 :					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100%
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100%
Sasaran Strategis 3 :					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	77	77,98	101,27%
Rata Rata Pencapaian Sasaran					101,27%
Sasaran Strategis 4 :					
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	4,99	7,97*	159,63%
Rata Rata Pencapaian Sasaran					159,63%
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					120,3%

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

BAB I PENDAHULUAN

Bencana Global pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah mempengaruhi arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai arahan pemerintah Pusat Kebijakan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan ekonomi pasca COVID 19. Kebijakan pemulihan ekonomi pasca COVID 19 serta Keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan skala prioritas yang sangat selektif dalam memilih prioritas program. Pada tahun 2021 terdapat perubahan anggaran yang disebabkan karena adanya pandemi COVID 19, sehingga terdapat target output, outcome dan sasaran yang berubah menyesuaikan dengan keadaan akibat dampak perubahan anggaran tersebut.

Laporan Kinerja BPKPD Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan visi Kabupaten Tasikmalaya dan mencapai misi BPKPD. Laporan kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja BPKPD. Penyusunan LKIP sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* yang diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya peran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD menurut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

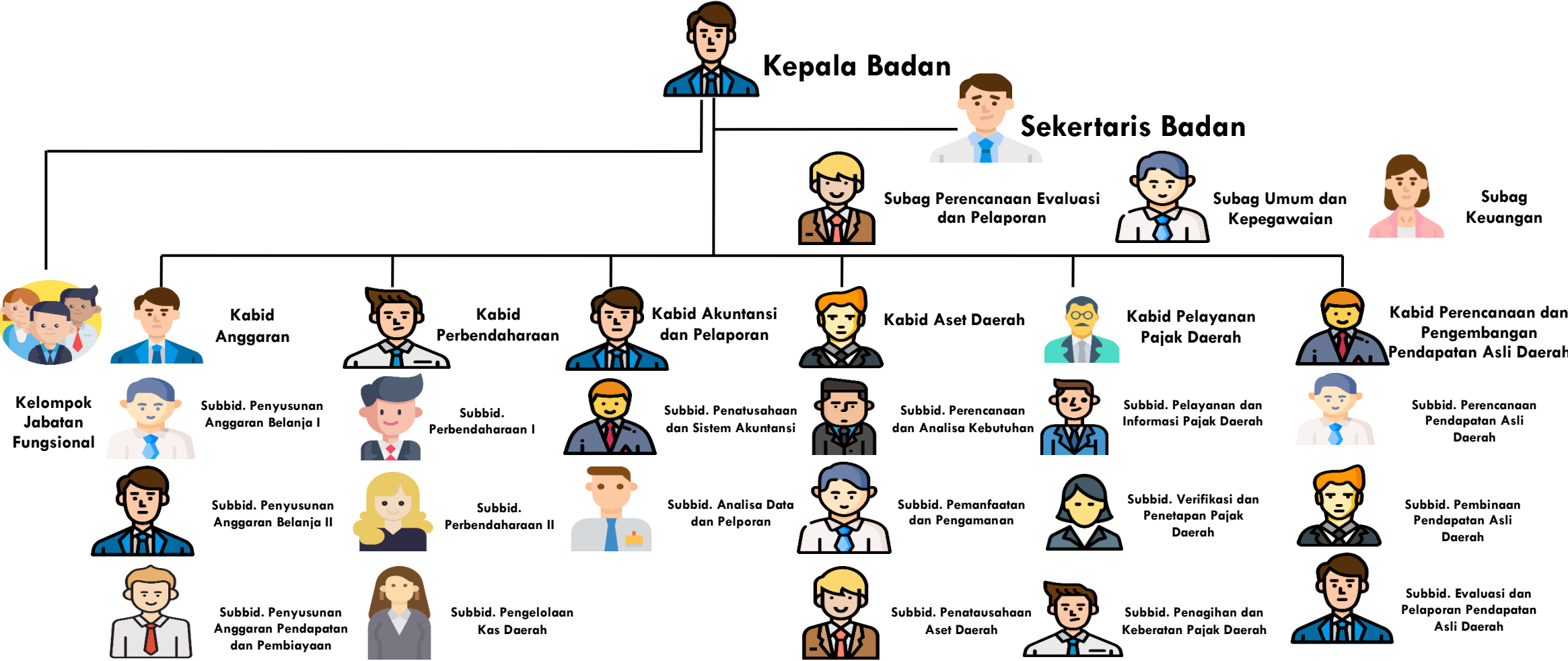
- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 - 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
- g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
- h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
- 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi BPKPD dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Menurut Perbup No. 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

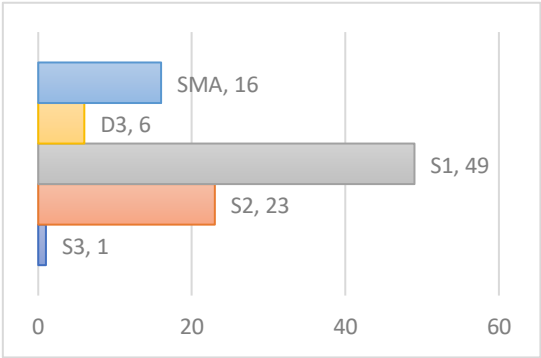
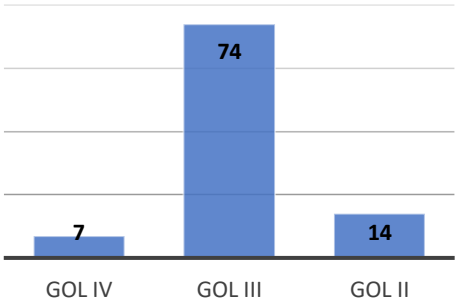


1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

A. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), BPKPD dibantu oleh sumber daya manusia yang terampil dan tepat di bidangnya secara substansi. Sampai akhir tahun 2021, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai berjumlah 95 orang. Rincian sebaran pegawai di lingkungan BPKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Grafik 1.1
Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin



B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.985	Unit/Buah	Baik
1	ALAT BESAR	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	KOMPUTER	505		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik
	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	104	Buah	Baik
	- Lap Top	85	Buah	Baik
	- Note Book	51	Buah	Baik
	- Tablet PC	13	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	119	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	22	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	12	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	76	Buah	Baik
3	ALAT ANGKUTAN	554	Unit	Baik
	- Sedan	1	Unit	Baik
	- Jeep	5	Unit	Baik
	- Station Wagon	1	Unit	Baik
	- Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	Unit	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	45	Unit	Baik
	- Pick Up	3	Unit	Baik
	- Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	497	Unit	Baik
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	840	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	26	Buah	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik

	- Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
	- Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	8	Buah	Baik
	- Rak Besi	46	Buah	Baik
	- Rak Kayu	1	Buah	Baik
	- Filing Cabinet Besi	73	Buah	Baik
	- Brandkas	2	Buah	Baik
	- Papan Visual/Papan Nama	50	Buah	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	6	Buah	Baik
	- Mesin Absensi	12	Buah	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
	- Papan Pengumuman	211	Buah	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
	- Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
	- Sice	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat	17	Buah	Baik
	- Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
	- Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
	- Kursi Rapat	36	Buah	Baik
	- Kursi Tamu	1	Buah	Baik
	- Kursi Putar	2	Buah	Baik
	- Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
	- Meja Komputer	2	Buah	Baik
	- Sofa	11	Buah	Baik
	- Meubeleur lainnya	1	Buah	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- A.C. Window	36	Buah	Baik
	- A.C. Split	3	Buah	Baik
	- Televisi	3	Buah	Baik
	- Unit Power Supply	7	Buah	Baik
	- Camera Video	4	Buah	Baik
	- Tustel	8	Buah	Baik
	- Dispenser	2	Buah	Baik
	- Handy Cam	2	Buah	Baik
	- Karpet	1	Buah	Baik
	- Gordyin/Kray	5	Buah	Baik
	- Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
	- DVD Player	1	Buah	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
	- Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik

	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
	- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik
	- Lemari Arsip Berkas	4	Buah	Baik
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	52	Buah	Baik
	- Audio Amplifier	2	Buah	Baik
	- Intercom Unit	4	Buah	Baik
	- Audio Command Desk	1	Buah	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Camera Electronic	8	Buah	Baik
	- Tripod Camera	1	Buah	Baik
	- Slide Projector	1	Buah	Baik
	- Lensa Kamera	1	Buah	Baik
	- Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
	- Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
	- Mesin Kertas	12	Buah	Baik
	- Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
	- Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik
	- Facsimile	1	Buah	Baik
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7	ALAT LABORATORIUM	3	Buah	Baik
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Distiling Apparatus	2	Buah	Baik

1.4 Isu Aktual

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Secara umum, isu-isu yang menjadi penghambat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi dan program adalah sebagai berikut:

1. Masih perlu ditingkatkan kemampuan ASN yang memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada serta sulitnya OPD dalam beradaptasi dan implementasi akibat adanya perubahan yang cepat pada peraturan perundang-undangan tersebut;
3. Belum optimal dan terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi (*e-government*) dalam mendukung akurasi dan kecepatan kerja di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Masih terdapat aset daerah yang belum tersertifikasi kepemilikannya dan masih terdapat aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah;
5. Belum optimalnya sistem pemutakhiran data wajib pajak daerah.

1.5 Sistematika LKIP

Sistematika Penyajian LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2021 merupakan masa transisi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB III, Pasal 3, Ayat (2) disebutkan bahwa *“Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 menjadi bagian dari Renstra Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati”*.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja). Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-3 (tiga) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan khususnya Bidang Keuangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, BPKPD mendukung misi ketiga yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**. Untuk mendukung pencapaian misi ketiga tersebut, BPKPD

merumuskan tujuan jangka menengah, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan:

- Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah;
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut sasaran dan indikator sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2016-2021:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;
 - Hasil Evaluasi SAKIP;
 - Ketepatan waktu penyusunan APBD;
 - Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD;
 - Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran;
- Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;
- Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah
- Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2021

No .	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	-	-	-	-	B	B (67)	BB (76)	BB (76)
		2. Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	-	-	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
		3. Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	-	-	-	-	100	100	100	100
		4. Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	-	-	-	-	5	4	3	3
		5. Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	-	-	-	-	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	-	-	-	-	85,5	85,75	86	86
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-	-	-	-	5%	- 13,22 %	4,99 %	4,99 %

Berikut sasaran dan indikator sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2021-2026:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	76	81	83	85	87	87
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	86
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90	90
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30	5,30

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKPD berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	1 Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan penilaian dari Inspektorat CC = 50-60 B = 60-70 BB = 70-80 A = 80-90 AA = 90 -100	Penilaian Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
		2 Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	Berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Paling lambat 31 Desember	Penetapan perda APBD
		3 Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah	$\left(\frac{\text{dokumen pelaporan yang diserahkan tepat waktu}}{\text{dokumen pelaporan yang harus diserahkan}} \times 100\% \right)$	Pelaporan Keuangan Daerah
		4 Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hasil penilaian sesuai dengan kriteria tertib asset	Hasil penilaian pengelolaan BMD

		5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	$\left(\frac{\text{dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundang-undangan}}{\text{dokumen realisasi belanja yang diterbitkan}} \times 100\% \right)$	Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan public. BPKPD berorientasi pelayanan public melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya	Hasil kuisioner yang diberikan kepada responden	Responden yaitu penerima pelayanan publik kecamatan pada tahun pengukuran
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	7	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau diabayar sendiri oleh wajib pajak	$\left(\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)} \times 100\% \right)$	LRA Pendapatan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	- Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	- PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 1) Pengungkit 60% (Aspek pemenuhan 20%, Aspek hasil antara 10%, Aspek reform 30%) 2) Hasil 40 (Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10%, Kualitas pelayanan publik 10%, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10% dan Kinerja organisasi 10%) yang telah dirumuskan dalam lembar kerja evaluasi (LKE).	- Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - Data kepegawaian; - SOP; - IKM; - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; - SK Kepala Badan. -
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana	- Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)x 100%) - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan /dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%)	- Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan - Peraturan Perundangan dan dokumen

				Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		realisasi belanja yang diterbitkan
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki dibagi jumlah sertifikat dan BPKB	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	$((\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) / (\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1))) \times 100\%$	LRA tahun n dan (n-1)

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri 2, yaitu Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026.

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	BB (76)
		Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	Tepat
		Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100
		Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	3
		Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	86
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	4,99

Data target dimulai Tahun 2019 dikarenakan BPKPD terbentuk pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan keuangan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	77
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	4,99

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2021, Indikator Kinerja Tahun 2021 dan DPA BPKPD Tahun 2021. Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2021 dan DPPA BPKPD Tahun 2021. Berikut adalah perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (76)
		Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat
		Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
		Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	3
		Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	86
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	4,99 %

Anggaran Belanja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	127.729.900	0,01%
		Ketepatan waktu penyusunan APBD	1.561.558.000	0,18%
		Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	430.537.000	0,05%
		Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	594.325.000	0,07%
		Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	776.425.887.841	87,54%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	104.454.089.643	11,78%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3.324.840.260	0,37%
TOTAL			886.918.967.644	100,00%

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	77%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	4,99%

Anggaran Belanja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104.581.819.543	11,79%
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	778.417.982.841	87,77%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	594.325.000	0,07%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3.324.840.260	0,37%
TOTAL			886.918.967.644	100,00%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah dan Visi Misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja 1

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja 2

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, BPKPD menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 886.918.967.644,- dan realisasi

sebesar Rp. 876.853.223.118,- maka persentase realisasi anggaran adalah 98,87%.

Tahun 2021 merupakan masa transisi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB III, Pasal 3, Ayat (2) disebutkan bahwa *“Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 menjadi bagian dari Renstra Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati”*. Sehingga RENSTRA BPKPD pun mengalami beberapa penyesuaian khususnya untuk penentuan tujuan organisasi agar kinerja BPKPD dapat lebih baik dan terarah.

Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja dari Renstra sebelumnya, sehingga dilakukan penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. BPKPD menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 886.918.967.644,- dan realisasi sebesar Rp. 876.853.223.118,- maka persentase realisasi anggaran adalah 98,87%.

Berikut pengukuran Kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2021
(Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2016-2021)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel					
1.1	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	BB (76)	BB (79,87)	105,09
1.2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	100
1.3	Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100
1.4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	3	3	100
1.5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					101,02
Sasaran Strategis 2 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD					
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,03	100,04
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100,04
Sasaran Strategis 3 :					
Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah					
3.1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	4,99	7,97	159,63
Rata Rata Pencapaian Sasaran					159,63
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					120,23

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

Dan berikut pengukuran Kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2021
(Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	N/A	N/A	-
Rata-Rata Pencapaian Sasaran					-
Sasaran Strategis 2 :					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100%
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100%
Sasaran Strategis 3 :					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	77	77,98	101,27%
Rata Rata Pencapaian Sasaran					101,27%
Sasaran Strategis 4 :					
Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	4,99	7,97	159,63
Rata Rata Pencapaian Sasaran					159,63%
Rata-rata Pencapaian Per Sasaran					120,3%

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A) Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021

Rata-rata capaian kinerja BPKPD Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021) sangat baik mencapai 120,23%. Selain capaian kinerja sasaran, BPKPD juga melakukan pengukuran capaian terhadap tujuan BPKPD, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Tujuan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Nilai Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
2		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	5	85,69	5	-38,13	5	16,05	1,61	6	6	22,57*

* Sumber: LRA TA 2021 (Data sementara dan unaudited) per 27 Januari 2022

1. Capaian Indikator Tujuan 1 (satu) Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah

Nilai Opini Laporan Keuangan merupakan salah satu Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai pencapaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan diturunkan menjadi Indikator Tujuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Target yang diharapkan setiap tahunnya yaitu mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Opini laporan keuangan merupakan hasil penilaian laporan keuangan n-1 dimana capaian Indikator Opini laporan keuangan pada tahun 2021 merupakan penilaian terhadap dokumen laporan keuangan tahun 2020. Pada tahun 2017, 2018 dan 2020 mendapatkan nilai opini keuangan WTP terhadap laporan keuangan tahun 2016, 2017 dan 2019 hal tersebut dapat tercapai dikarenakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tasikmalaya telah baik, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tahun 2019 (penilaian laporan keuangan tahun 2018) tidak dapat mempertahankan nilai tersebut dikarenakan Realisasi opini keuangan yang didapat yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil WDP pada tahun 2019 didapat dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan juga adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil yang didapat pada tahun 2021 telah memenuhi target WTP sehingga pencapaian kinerja menunjukkan persentase 100%. Faktor pendukung perolehan WTP yaitu pada aset tetap yang telah disajikan dengan wajar.

Indikator tujuan ini didukung oleh 2 (dua) dua sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran. Diharapkan pengelolaan keuangan semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian karena pencapaian nilai opini tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

2. Capaian Indikator Tujuan 2 (dua) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan PAD dihitung dari selisih realisasi PAD tahun N dengan tahun N-1 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun N-1.

Pada tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp. 374.924.483.900,50 dan tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 305.887.233.378,47,- atau tumbuh sebesar 22,57%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

Capaian pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2021 salah satunya didominasi dari sektor pajak daerah,

keberhasilan capaian tersebut karena beberapa faktor diantaranya:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
- 2) Pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa Pendataan Objek Pajak Bangunan PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pendataan Objek Pajak Daerah Non PBB, Pemuktahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Penilaian Individual;
- 3) Pelaksanaan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak perorangan dan perusahaan.



3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2021 (%)
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (76)	BB (79,87)	105,09
		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat	Tepat	100
		3	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100
		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	3	3	100
		5	Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,03	100,04
3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah	1	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	4,99%	7,97%*	159,63

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

1.1 Capaian indikator kinerja Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Terbatas atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, bahwa BPKPD mendapat nilai 79,87 dengan kategori “B” atau “Sangat Baik” artinya akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

1.2 Capaian indikator kinerja ketepatan waktu penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan tepat waktu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2021.

1.3 Capaian indikator kinerja Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaporan keuangan yang diserahkan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan sebanyak 12 dokumen, LRA Triwulanan sebanyak 4 dokumen, LRA Semesteran 1 dokumen dan LKPD Preliminary Tahun 2020 sebanyak 1 dokumen. Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan anantara lain :

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020.

1.4 Capaian indikator kinerja Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD

Kabupaten Tasikmalaya telah mengelola BMD dengan baik, namun masih ada beberapa SKPD yang belum tertib dalam melakukan pengelolaan BMD. Pada awal tahun 2021 terdapat 4 SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD di masing-masing SKPD nya. Dan pada akhir tahun 2021 ditargetkan 3 SKPD yang belum tertib BMD dan terealisasi 3

SKPD yang belum tertib BMD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

1.5 Capaian indikator kinerja Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Perhitungan realisasi belanja daerah berdasarkan jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang diterbitkan. Pada tahun 2021, jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 118 dokumen terdiri dari dokumen belanja operasional gaji dan tunjangan 90 dokumen, dokumen belanja bansos 2 dokumen, dokumen belanja hibah 2 dokumen, dokumen belanja operasional lainnya 11 dokumen, dokumen belanja transfer 12 dokumen dan dokumen belanja tidak terduga 1 dokumen. Dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6 Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.13
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Jenis Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai
1	Pelayanan Umum	657	86,76
2	Pelayanan SP2D Perbendaharaan I	357	85,70
3	Pelayanan SP2D Perbendaharaan II	56	86,76
4	Pelayanan Gaji	56	85,88
5	Pelayanan SKPP	260	86,75
6	Pelayanan SP2D Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	165	86,76
7	Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah	56	85,73
8	Pelayanan PBB	371	85,77
9	Pelayanan BPHTB	19	85,73
10	Pelayanan Non PBB dan Non BPHTB	254	85,75
11	Pelayanan Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan	76	85,44
12	Pelayanan Rekonsiliasi Aset	48	85,44
Rata-rata			86,03

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKPD dengan mutu pelayanan sangat baik, hal ini tercermin dari hasil rata-rata IKM BPKPD dari 12 (dua belas) jenis pelayanan pada Tahun 2021 dengan nilai 86,03 sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD adalah 100,04% dari target sebesar 86. Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKPD Kab. Tasikmalaya.

1.7 Capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Pada Tahun 2021, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 89.383.145.412,- dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 75.239.545.192,- atau 84,18%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp 5.551.155.671,- meningkat 7,97% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan pajak daerah. Peningkatan pertumbuhan pajak daerah tersebut terjadi karena adanya geliat perekonomian pasca pandemi covid-19, sehingga pencapaian terhadap pendapatan pajak daerah bertambah. Realisasi pajak daerah dibandingkan dengan target tercapai 84,18% namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian tersebut meningkat.



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian	Target Akhir Tahun Renstra (2021)
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	70,08	BB (79,87)	114,1	BB (76)
		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat	Tepat	100	Tepat
		3	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100	100%
		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	4	3	133,33	3
		5	Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,83	86,03	100,23	86
3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah	1	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	-6,48%	7,97%*		4,99

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

1.1 Hasil Evaluasi SAKIP

Perbandingan realisasi indikator hasil evaluasi SAKIP, pada tahun 2020 mendapat nilai BB (70,08) sedangkan pada tahun 2021 mendapat nilai BB (79,87). Terdapat peningkatan pada nilai SAKIP BPKPD Tahun 2021. Sehingga capaian realisasi Tahun 2021 terhadap Tahun 2020 yaitu 114,1%.

1.2 Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

Perbandingan realisasi indikator kinerja Ketepatan waktu penyusunan APBD, pada tahun 2020 penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 dengan ditetapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021. Pada Tahun 2021, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 juga ditetapkan tepat waktu yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ditetapkannya Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Maka capaian realisasi indikator ini terhadap realisasi tahun 2020 yaitu 100%.

1.3 Persentase Pelaporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2020 pelaporan keuangan Kab. Tasikmalaya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan capaian 100% dan pada tahun 2021 pun pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan capaian 100%, sehingga capaian realisasi indikator kinerja ini terhadap realisasi indikator tahun 2020 yaitu 100%.

1.4 Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD

Perbandingan realisasi kinerja berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD, pada tahun 2020 SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD ada 4 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Dinas Pendidikan. Sementara pada tahun 2021, SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD

ada 3 SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Karena pada Tahun 2021 telah dilakukan pembinaan terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman atas pengelolaan BMD. Maka realisasi tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3 SKPD. Sehingga capaian realisasi kinerja indikator ini terhadap realisasi tahun 2020 adalah 133,33%.

1.5 Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perbandingan indikator kinerja realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2020 realisasi belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 100% dan pada tahun 2021 realisasi belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau 100%. Maka realisasi tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%. Sehingga capaian realisasi kinerja indikator ini terhadap realisasi tahun 2020 adalah 100%.

1.6 Indeks kepuasan masyarakat

Perbandingan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat, pada tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat 85,83 (terdiri dari 11 layanan) sedangkan pada tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat 86,03 (terdiri dari 12 layanan). Terdapat peningkatan indeks pada tahun 2021. Sehingga capaian realisasi tahun 2021 terhadap realisasi tahun 2020 yaitu 100,23%.

1.7 Persentase pertumbuhan pajak daerah

Pada Tahun 2021, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 89.383.145.412,- dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 75.239.545.192,- (data sementara per tanggal 27 Januari 2022) atau 84,18%.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp 69.688.389.521,-. Jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp 5.551.155.671,- meningkat 7,97% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan pajak daerah.



3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	-	-	-	B	CC	-	B	B	100	B	B	100	B (67)	BB (70,08)	104,60	BB (76)	BB (79,87)	105,09
		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	100	Tepat	Tepat	100	Tepat	Tepat	100	Tepat	Tepat	100	Tepat	Tepat	100	Tepat	Tepat	100
		3	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	-	-	-	6	6	100	6	6	100	5	4	125	4	4	100	3	3	100
		5	Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, seumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	85,53	85,53	100	86,5	85,14	98,43	85,5	85,58	100,09	85,75	85,83	100,09	86	86,03	100,04
3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah	1	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	%	5	10,24	204,8	5	18,67	373,4	5	8,72	174,40	5	10,94	218,80	-13,22	-6,48	204,01	4,99	7,97*	159,63

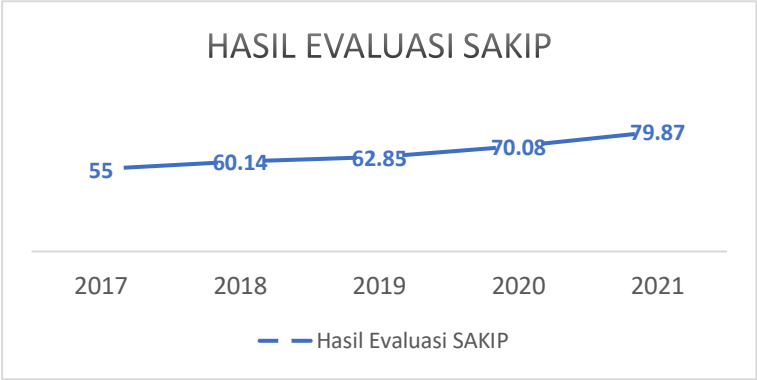
*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

1.1 Hasil evaluasi SAKIP

Indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik, dapat dilihat pada tabel 3.9 dimana pada tahun 2017 nilai SAKIP masih rendah yaitu CC dengan nilai 55. Tahun 2018 nilai SAKIP BPKPD meningkat menjadi B dengan nilai sebesar 60,14. Tahun 2019 meningkat menjadi 62,85. Tahun 2020 peningkatannya cukup besar menjadi 70,08 dan Tahun 2021 juga peningkatannya cukup besar menjadi 79,87 dengan predikat BB. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 maka persentase peningkatannya sebesar 9,79 poin.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.1
Hasil Evaluasi
SAKIP



Tahun 2021 merupakan tahun akhir RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021. Target akhir indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP pada RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021 yaitu BB (76). Maka capaian terhadap target akhir RENSTRA BPKPD Tahun 2016-2021 adalah 100%.

1.2 Ketepatan waktu Penyusunan APBD

Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2022 Nomor 10 Tahun 2021 ditetapkan tanggal 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 ditetapkan Tanggal 31 Desember 2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan APBD tidak melebihi tanggal 31 Desember yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.

Capaian kinerja tahun ini mempertahankan capaian realisasi tahun sebelumnya, dimana penyelesaian penyusunan APBD dapat diselesaikan tepat waktu yaitu tanggal 31 Desember. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Penetapan APBD

No	Tahun	Perda/Perbup	Tanggal Penetapan
1	2016	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2017 Nomor 13 Tahun 2016	29 Desember 2016
2	2017	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2018 No. 8 Tahun 2017	29 Desember 2017
3	2018	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2019 Nomor 6 Tahun 2018	31 Desember 2018
4	2019	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2020 Nomor 9 Tahun 2019	27 Desember 2019
5	2020	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2021 Nomor 3 Tahun 2020	30 Desember 2020
6	2021	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2022 Nomor 10 Tahun 2021	31 Desember 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa BPKPD konsisten dalam melakukan penetapan APBD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pencapaian persentase pelaporan keuangan 100%. Peraturan perundangan-undangan disini artinya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja. Pelaporan tersebut berupa pelaporan keuangan bulanan (12 dokumen), per triwulan (4 dokumen), per semester (2 dokumen) dan laporan pertanggungjawaban (3 dokumen) yang diserahkan tepat waktu kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Provinsi Jawa Barat. BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

1.4 Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD

Indikator Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD tahun 2021 mempunyai capaian kinerja sesuai target yaitu 100%. Pada Tahun 2021 target SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD adalah 3 SKPD dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 3 SKPD. Telah memenuhi target akhir RENSTRA yaitu 3 SKPD dari total SKPD sebanyak 59 SKPD maka capaian tahun 2021 mencapai 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 realisasi SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD sejumlah 6 SKPD dan baru mengalami penurunan pada tahun 2019 dikarenakan ada perubahan SOTK. Sementara pada 2020 berdasarkan SOTK baru, realisasi SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD sejumlah 4 SKPD.

1.5 Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

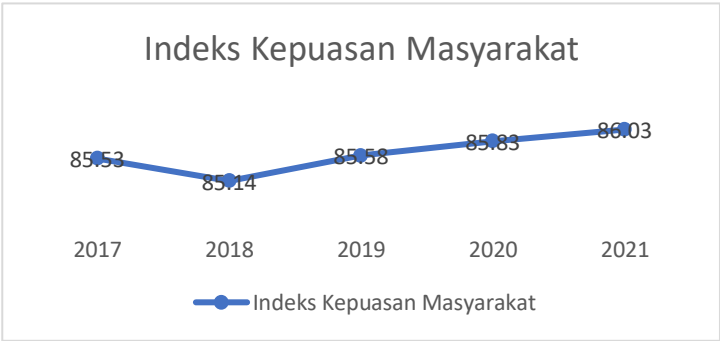
Persentase realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun mendapat capaian yang sesuai target, setiap tahunnya realisasi belanja daerah mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengelolaan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya selalu berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang diterapkan salah satunya yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 2021 merupakan tahun akhir RENSTRA. Dan pada Tahun 2021 mencapai 100% sehingga persentase capaian akhir tahun RENSTRA sebesar 100%.

1.6 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami fluktuasi capaian setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terjadi penurunan IKM pada Tahun 2018 dengan nilai 85,14 capaian ini hanya 98,43% dari target Tahun 2018 yang sebesar 86,50. Ketidaktercapaian ini karena terjadi permasalahan pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tasikmalaya sehingga berakibat terhadap pandangan masyarakat terhadap layanan BPKPD menurun. BPKPD melakukan peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan SKPD lain di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pada tahun 2019 IKM meningkat menjadi 85,58, pada tahun 2020 pun mengalami peningkatan menjadi 85,83 dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 86,03. Jika dilihat perkembangannya, capaian kinerja sasaran ini sejak tahun pertama hingga tahun ke empat mengalami trend naik kecuali di tahun 2018. Data ini dapat ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:

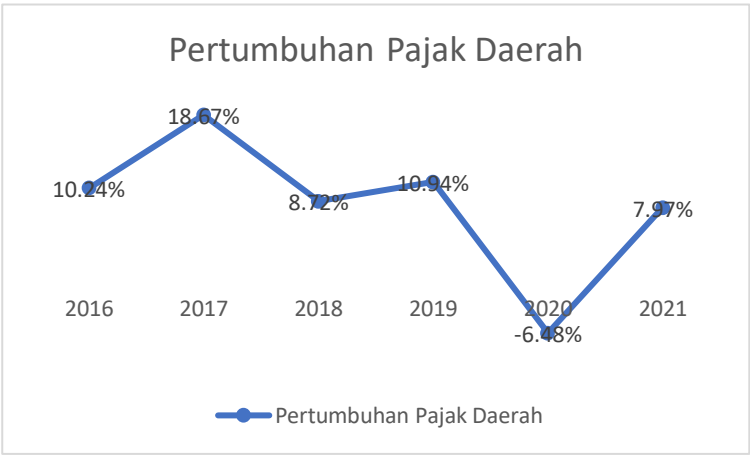
Grafik 3.2
Indeks Kepuasan
Masyarakat



1.7 Persentase pertumbuhan pajak daerah

Pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi yang positif, pertumbuhan pajak tersebut didapat dari selisih pajak daerah tahun bersangkutan dikurangi pajak daerah (n-1) dibagi pajak daerah (n-1). Pertumbuhan pajak yang paling tinggi pada tahun 2017 dengan capaian pertumbuhan sebesar 18,67% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 8,72% kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup baik menjadi 10,94%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pendapatan pajak daerah. Hal tersebut membuat BPKPD melakukan revisi terhadap target pajak daerah menjadi -13,22% dan teralisasi -6,48% sehingga capaian kinerja pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 204,01%. Sementara pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 7,97%. Hal ini dikarenakan adanya geliat ekonomi di masa pandemi covid-19. Data ini dapat ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3
Pertumbuhan
Pajak Daerah





3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.11
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
				Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	Tidak Ada	-	-
		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat (31 Desember 2021)	Tepat (31 Desember 2021)	100
		3	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tidak Ada	-	-
		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	Tidak Ada	-	-
		5	Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tidak Ada	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	-	-
3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah	1	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	Tidak Ada	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dari 7 indikator kinerja, hanya 1 indikator kinerja yang mempunyai target nasional yaitu indikator kinerja Ketepatan waktu penyusunan APBD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Tabel 7 tentang

Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD bahwa Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember).

Berdasarkan poin (r) dalam Teknik Penyusunan APBD dijelaskan: *“Apabila DPRD dan Kepala yang tidak menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disebabkan oleh Kepala Daerah terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 7”*.



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1.1 Hasil Evaluasi SAKIP

Pencapaian kinerja BPKPD atas hasil evaluasi SAKIP meningkat pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh faktor personal yaitu komitmen sumber daya manusia di BPKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat berjalan dengan optimal serta faktor kepemimpinan. Aspek pendukung kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan yang sangat optimal, sehingga aparatur dapat mengoptimalkan kemampuannya untuk mewujudkan kinerja yang baik. Selain itu BPKPD telah mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja, dimana setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada kinerja yang

dihasilkan. Kemudian BPKPD juga telah melaksanakan rapat evaluasi triwulanan mengenai pelaksanaan kegiatan.

Namun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh BPKPD yaitu pada aspek perencanaan kinerja, Dokumen Renstra belum dievaluasi, tidak ada rekomendasi dalam evaluasi program dan belum adanya SOP perbaikan dokumen. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Tahun 2021 BPKPD telah melaksanakan evaluasi Renstra, kemudian pada evaluasi program telah dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut serta telah ditetapkannya SOP perbaikan dokumen.

1.2 Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

Pencapaian kinerja BPKPD atas ketepatan waktu penyusunan APBD telah tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini antara lain adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan penyusunan APBD. Langkah kedepan, BPKPD akan terus mengupayakan untuk selalu tepat waktu, karena ketepatan waktu penetapan APBD dapat mendukung dalam pencapaian tujuan BPKPD yaitu mendapatkan opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

1.3 Persentase Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2021 mencapai 100%. Faktor pendukung atas tercapainya indikator kinerja ini yaitu komitmen pegawai BPKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal. Langkah kedepannya, BPKPD akan selalu menyajikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam Pengelolaan BMD

Pencapaian kinerja berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD terdapat peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 3 SKPD. Hal ini dikarenakan telah dilakukan pembinaan pengelolaan BMD terhadap 1 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman. Untuk kedepannya akan terus dilaksanakan lagi pembinaan pengelolaan BMD terhadap 3 SKPD lagi.

1.5 Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pencapaian kinerja persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2021 mencapai 100%. Meskipun pada Tahun 2021 terdapat perbedaan dalam jenis belanja daerah, dan terdapat penambahan dokumen laporan terkait belanja daerah, tetapi BPKPD mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dikarenakan komitmen Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk kedepannya, BPKPD akan terus meningkatkan kinerja atas dokumen pelaporan realisasi belanja daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja BPKPD atas indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa BPKPD memiliki tingkat pelayanan yang baik dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan peningkatan indeks kepuasan masyarakat antara lain Faktor SDM, kemampuan aparatur BPKPD berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, BPKPD memiliki inovasi terhadap pelayanan, yaitu dengan diresmikannya ruangan tamu

khusus, agar setiap tamu yang datang ke BPKPD mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Diharapkan pencapaian tersebut dapat ditingkatkan kembali dengan melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

1.7 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Pencapaian kinerja BPKPD atas persentase pertumbuhan pajak daerah meningkat pada tahun 2021. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak perorangan dan perusahaan;
2. Pelaksanaan Pembinaan kepada kolektor Kecamatan dan Desa serta para Kepala Wilayah (Kadus) di Desa;
3. Pelaksanaan Rekonsiliasi, Evaluasi dan Penagihan PBB P2 ke Kecamatan dan Desa secara berkala;
4. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 973/Kep.148-BPKPD/2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020.



3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Hanya untuk capaian kinerja ≥ 100%)

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja			
				% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	105,09	94,72	5,28
		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	100	94,67	5,33
		3	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	98,38	1,62
		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	100	94,59	5,41
		5	Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	99,50	0,5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,04	96,25	3,75
3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah	1	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	159,63	97,78	2,22

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

Indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran paling tinggi yaitu berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat 1 (satu) indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran yaitu indikator persentase realisasi belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator tersebut secara capaian kinerja telah memenuhi target namun dari sisi alokasi anggaran hampir seluruhnya direalisasikan. Hal ini dikarenakan didalam program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang indikator persentase realisasi belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat kegiatan penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, dan Dana Bagi Hasil. Dimana kegiatan tersebut memang seharusnya anggaran-anggaran tersebut direalisasikan seluruhnya.



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.13

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Program/ Kegiatan	Uraian/ Penjelasan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2021 (%)		
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (76)	BB (79,87)	105,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator program ini yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan IKM. Maka dari itu, program ini sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja Hasil Evaluasi SAKIP
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Diantara beberapa kegiatan yang terdapat dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan ini sangat menunjang terhadap pencapaian indikator program Nilai Evaluasi SAKIP. Sub indikator- sub indikator yang terdapat dalam kegiatan ini, menunjang pada pencapaian indikator kegiatan ini, yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Karena dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan dievaluasi untuk mendapatkan nilai SAKIP.

		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat	Tepat	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja ketepatan waktu penyusunan APBD
							Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Diantara beberapa kegiatan yang terdapat dalam program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan ini sangat mendukung pada ketepatan waktu penyusunan APBD. Karena dalam output-output sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini merupakan dokumen-dokumen sebagai tahapan penyusunan APBD serta penetapan APBD
		3	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
							Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Diantara beberapa kegiatan yang terdapat dalam program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena output-output sub kegiatan ini, mendukung pada pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	3	3	100	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator program ini yaitu persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Maka dari itu, program ini sangat mendukung pada pencapaian kinerja

							berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD.
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan ini mendukung pada pencapaian kinerja indikator berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, sub kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/ kota sangat mendukung dalam pencapaian indikator kinerja berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD
	5	Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja realisasi belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
						Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan ini mendukung pada tercapainya indikator kinerja realisasi belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan perbendaharaan daerah merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah belanja rutin seperti gaji dan tunjangan
						Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan ini juga mendukung pada tercapainya indikator kinerja realisasi belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini juga merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak daerah

2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,03	100,04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program ini sangat menunjang pada pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Karena indikator program ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat pada program ini yaitu indeks kepuasan terhadap layanan umum
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu penyaluran gaji dan tunjangan ASN
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan

3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah	1	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	4,99%	7,97%*	159,63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini sangat menunjang pada pencapaian indikator kinerja pertumbuhan pajak daerah. Indikator program ini adalah persentase pengelolaan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah baik, maka pertumbuhan pajak pun akan meningkat.
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian persentase pengelolaan pajak daerah. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, yang mempunyai peran secara langsung dalam pertumbuhan pajak daerah antara lain penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penagihan pajak daerah serta oengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

B) Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026

Rata-rata capaian kinerja BPKPD Tahun 2021 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026) sangat baik mencapai 115,23%. Selain capaian kinerja sasaran, BPKPD juga melakukan pengukuran capaian terhadap tujuan BPKPD, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Tujuan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66,489	66,489

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.487-BP2D/2021 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-9 dengan indeks 58,40 (Kategori Perlu Perbaikan). Pada tahun 2019 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-7 dengan indeks 59,06 (Kategori Perlu Perbaikan). Dan untuk tahun 2020 nilai IPKD Kab. Tasikmalaya 66,489 (Kategori Perlu Perbaikan) berada di peringkat ke-6.

Capaian IPKD Kab. Tasikmalaya dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai nilai maksimal dan mendapat kategori baik.

Indikator tujuan ini didukung oleh 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Diharapkan pengelolaan keuangan semakin meningkat, sehingga bisa mendapatkan kategori baik dan mempertahankannya.



3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.15
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	-
2	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100%	100%	100
3	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	77	77,98	101,27
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	4,99	7,97*	159,63

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah di tahun 2021 tidak ditargetkan, dikarenakan pada tahun 2021 belum melakukan penilaian dan akan dilakukan penilaian pada tahun 2022. Serta aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tersebut belum sepenuhnya siap.

Hasil evaluasi PMPRB BPKPD berdasarkan *self assessment* Tahun 2021 untuk penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya adalah 27,56.

Jika dibandingkan dengan bobot penilaian yaitu 36,30, maka nilai PMPRB BPKPD adalah 75,92. Belum ada

interpretasi atas hasil *self assessment* evaluasi PMPRB BPKPD Tahun 2021.

1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator ini terdiri dari 3 sub indikator, yaitu :

- 1) Penetapan APBD tepat waktu;
- 2) Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- 3) Pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan tepat waktu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2021. Sehingga capaian sub indikator penetapan APBD tepat waktu adalah 100%.

Pelaporan keuangan yang diserahkan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan sebanyak 12 dokumen, LRA Triwulanan sebanyak 4 dokumen, LRA Semesteran 1 dokumen dan LKPD Preliminary Tahun 2020 sebanyak 1 dokumen. Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan anantara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020.

Sehingga capaian sub indikator laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki capaian 100%

Perhitungan realisasi belanja daerah berdasarkan jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang diterbitkan. Pada tahun 2021, jumlah dokumen realisasi belanja jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 118 dokumen terdiri dari dokumen belanja operasional gaji dan tunjangan 90 dokumen, dokumen belanja bansos 2 dokumen, dokumen belanja hibah 2 dokumen, dokumen belanja operasional lainnya 11 dokumen, dokumen belanja transfer 12 dokumen dan dokumen belanja tidak terduga 1 dokumen. Dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Maka realisasi indikator rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

1.3 Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan

Berdasarkan data per 31 Desember 2021, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 3170 unit kendaraan dan 771 bidang tanah, sehingga jumlah BMD (kendaraan dan tanah) sebanyak 3941. Sedangkan kendaraan yang telah memiliki BPKB sebanyak 2681 unit dan tanah yang dilengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) sebanyak 392 bidang, sehingga jumlah BMD (kendaraan dan tanah) yang telah dilengkapi bukti kepemilikan sebanyak 3073. Maka persentase BMD yang telah

dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan 77,98, sehingga capaian kinerja indikator kinerja ini adalah 101,27%.

1.4 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Pada Tahun 2021, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 89.383.145.412,- dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 75.239.545.192,- atau 84,18%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp 5.551.155.671,- meningkat 7,97% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan pajak daerah. Peningkatan pertumbuhan pajak daerah tersebut terjadi karena adanya geliat perekonomian pasca pandemi covid-19, sehingga pencapaian terhadap pendapatan pajak daerah bertambah. Realisasi pajak daerah dibandingkan dengan target tercapai 84,18% namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian tersebut meningkat.



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.16

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Realisasi Tahun 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	87	-
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100	100%	100
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	74%	77,98%	101,27	90%	86,64
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-6,48%	7,97%*	159,63	5,30%	150,38

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Self Assessment penilaian evaluasi PMPRB di Pemerintah Kab. Tasikmalaya untuk pertama kalinya dilakukan di tahun 2021. Namun belum dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang dikarenakan belum siapnya aturan terkait Penilaian Reformasi Birokrasi di Kaupaten Tasikmalaya. Sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya yang dapat menunjukkan kenaikan/ penurunan capaian kinerja tahunan.

1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian indikator kinerja ini konsisten setiap tahunnya yaitu memenuhi target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, persentase capaian tahun 2021 adalah 100%

1.3 Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan

Uraian BMD	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Kendaraan	3.149 unit	3.170 unit
Jumlah Bidang Tanah	729 bidang	771 bidang
Total	3.878 unit/bidang	3.941 unit/bidang
Jumlah Kendaraan yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan	2.600 unit	2.681 unit
Jumlah Bidang Tanah yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan	287 bidang	392 bidang
Total	2.887 unit/bidang	3.073 unit/bidang
%Capaian	74%	79,98%

Dilihat dari Tabel 3.15 terdapat kenaikan pada capaian indikator kinerja ini. Persentase realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 101,27%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, persentase realisasi kinerja tahun ini adalah 86,64%.

1.4 Persentase pertumbuhan pajak daerah

Pada Tahun 2021, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 89.383.145.412,- dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 75.239.545.192,- (data sementara per tanggal 27 Januari 2022) atau 84,18%.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp 69.688.389.521,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp 5.551.155.671,- meningkat 7,97% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan pajak daerah.



3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

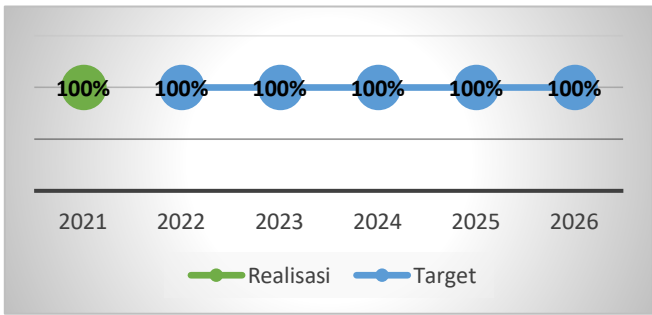
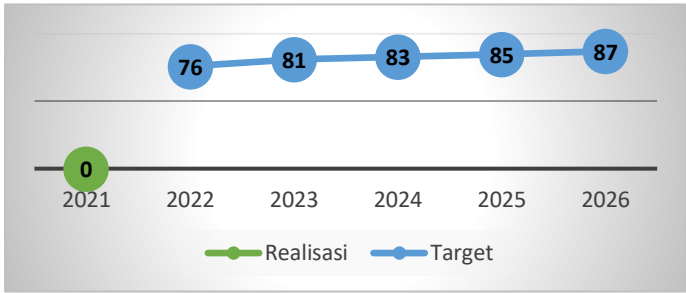
Tabel 3.18
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Realisasi		Target	Target	Target	Target	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	-	76	81	83	85	87
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	77	77,98	101,27	80	83	86	89	90
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	4,99	7,97	159,63	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

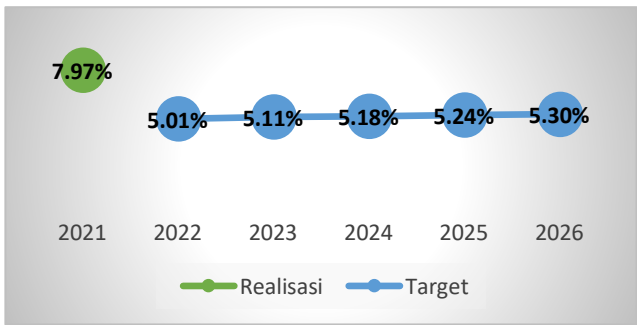
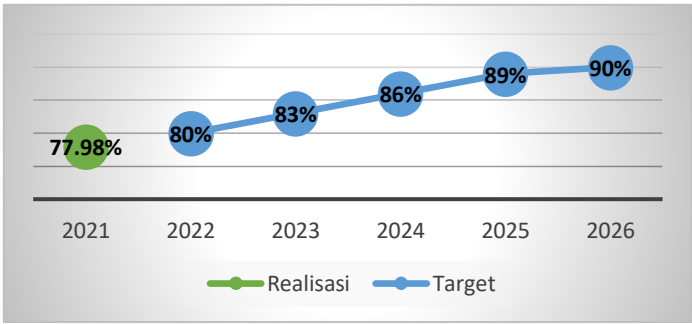
Tahun 2021 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis 2021-2026 sehingga belum ada perbandingan yang dapat menunjukkan kenaikan/ penurunan capaian kinerja tahunan. Berikut grafik perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2021 dengan target Renstra 2021-2026:

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Tahun 2021 Indikator Kinerja **Nilai Indeks Reformasi Birokrasi** dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Grafik 3.5
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Grafik 3.6
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Grafik 3.7
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.19
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
				Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penetapan APBD TA 2022 Tepat Waktu (31 Desember)	Penetapan APBD TA 2022 Tepat Waktu (31 Desember 2021)	100%
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	-	-	-
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.19 Indikator kinerja yang mempunyai target nasional yaitu Rata-rata persentase APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja tersebut terdiri 3 (tiga) sub indikator. Diantara ketiga sub indikator tersebut, hanya 1 (satu) indikator yang mempunyai target nasional yaitu penetapan APBD tepat waktu.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Tabel 7 tentang

Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD bahwa Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember).

Berdasarkan poin (r) dalam Teknik Penyusunan APBD dijelaskan: *“Apabila DPRD dan Kepala yang tidak menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disebabkan oleh Kepala Daerah terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 7”.*



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan *self assessment* PMPRB di Kabupaten Tasikmalaya. BPKPD mendapat capaian kinerja 100% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dan mendapatkan nilai 27,56 atau 75,92 jika dibandingkan dengan bobot penilaian. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

1. Faktor Organisasi, BPKPD telah membuat *cascading* sampai ke jajaran staf sehingga seluruh pegawai telah melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal;

2. Faktor Tata Kelola, BPKPD telah memiliki SOP untuk tiap jenis pelayanannya serta dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan setiap setahun sekali;
3. Faktor SDM, adanya komitmen dari seluruh pegawai BPKPD Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat menunjang pencapaian target kinerja BPKPD.

Pencapaian kinerja BPKPD akan terus ditingkatkan setiap tahunnya, dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh BPKPD yaitu komponen pengungkit antara lain pada area perubahan Penataan Tatalaksana-Sub area Proses Bisnis dan Prosedur Operasional tetap (SOP), Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM-sub area Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, dan area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan-sub area Budaya Pelayanan Prima, pengelolaan pengaduan serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Sedangkan untuk komponen Reform yang harus diperbaiki antara lain pada area perubahan manajemen perubahan-sub area komitmen dalam perubahan, area perubahan deregulasi kebijakan-peran kebijakan, area perubahan penataan tatalaksana-sub area transformasi digital memberikan nilai manfaat, area perubahan penguatan akuntabilitas-sub area efektifitas dan efisiensi anggaran-sub area pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja dan area perubahan penguatan pengawasan-sub area-penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Menindaklanjuti hal tersebut BPKPD akan melaksanakan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi yang telah ditentukan pada awal perencanaan sebelumnya.

1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; pelaporan keuangan; pelayanan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Realisasi Indikator kinerja ini dapat pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan penyusunan APBD;
2. Adanya komitmen pegawai BPKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal;

Langkah kedepan, BPKPD akan terus mengupayakan untuk selalu tepat waktu, karena ketepatan waktu penetapan APBD dapat mendukung dalam pencapaian tujuan BPKPD yaitu mendapatkan opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kemudian BPKPD akan selalu menyajikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan akan terus meningkatkan kinerja atas dokumen pelaporan realisasi belanja daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan

Pada realisasi indikator kinerja ini, BPKPD telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen antara Pemerintah Daerah dengan KPK RI dalam program MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) Korsupgah untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah;

2. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

1.4 Persentase pertumbuhan pajak daerah

Realisasi indikator kinerja ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak perorangan dan perusahaan;
2. Pelaksanaan Pembinaan kepada kolektor Kecamatan dan Desa serta para Kepala Wilayah (Kadus) di Desa;
3. Pelaksanaan Rekonsiliasi, Evaluasi dan Penagihan PBB P2 ke Kecamatan dan Desa secara berkala;
4. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 973/Kep.148-BPKPD/2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020.



3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.20

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Hanya untuk capaian kinerja ≥ 100%)

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja			
				% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	95,09	4,91
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	99,38	0,62
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	101,27	94,59	5,41
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	159,63	159,63	2,22

Berdasarkan tabel 3.20 di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

Indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran paling tinggi yaitu berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat 1 (satu) indikator yang tidak menunjukkan efisiensi

anggaran yaitu indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator tersebut secara capaian kinerja telah memenuhi target namun dari sisi alokasi anggaran hampir seluruhnya direalisasikan. Hal ini dikarenakan didalam program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang indikator persentase realisasi belanja daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat kegiatan penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, dan Dana Bagi Hasil. Dimana kegiatan tersebut memang seharusnya anggaran-anggaran tersebut direalisasikan seluruhnya.



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.21

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Program/ Kegiatan	Uraian/ Penjelasan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2021 (%)		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator program ini yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan IKM. SAKIP dan IKM sangat mendukung pada pencapaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kegiatan ini sangat menunjang terhadap pencapaian indikator program Nilai Evaluasi SAKIP. Sub indikator- sub indikator yang terdapat dalam kegiatan ini, menunjang pada pencapaian indikator kegiatan ini, yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Karena dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan dievaluasi untuk mendapatkan nilai SAKIP. Maka dari itu kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini

								diantaranya yaitu penyaluran gaji dan tunjangan ASN
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah

2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja ketepatan waktu penyusunan APBD
							Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan ini sangat mendukung pada Indikator program Persentase pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sub indikator penetapan APBD yang tepat waktu. Karena dalam output-output sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini merupakan dokumen-dokumen sebagai tahapan penyusunan APBD serta penetapan APBD
							Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan ini mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan perbendaharaan daerah merupakan fasilitasi penyaluran belanja belanja rutin seperti gaji dan tunjangan
							Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena output-output sub kegiatan ini, mendukung pada

								pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
							Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan ini juga mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini juga merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak daerah
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	3	3	101,27	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator program ini yaitu persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Maka dari itu, program ini sangat mendukung pada pencapaian kinerja berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD.
							Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan ini mendukung pada pencapaian kinerja indikator berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, sub kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/ kota sangat mendukung dalam pencapaian indikator kinerja berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD
4	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	1	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	4,99%	7,97%*	159,63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini sangat menunjang pada pencapaian indikator kinerja pertumbuhan pajak daerah. Indikator program ini adalah persentase pengelolaan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah baik, maka pertumbuhan pajak pun akan meningkat.

							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian persentase pengelolaan pajak daerah. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, yang mempunyai peran secara langsung dalam pertumbuhan pajak daerah antara lain penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penagihan pajak daerah serta oengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber: LRA TA 2021 (Data Sementara dan Unaudited) per 27 Januari 2022

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan total anggaran BPKPD pada tahun 2021 sebesar 98,87% dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran BPKPD pada tahun 2021 sebesar Rp. 886.918.967.444,- dengan realisasi sebesar Rp. 876.853.223.118,-. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada sasaran Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 99,38%. Sedangkan penyerapan terkecil pada sasaran Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel sebesar 94,59%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel berikut:

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2021 dan menggambarkan perkembangan pencapaian kinerja selama beberapa tahun. Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. LKIP merupakan upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP bagi BPKPD juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi BPKPD.

Pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2021 sebesar 120,3% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKPD pada tahun 2021 telah melaksanakan kinerja dengan baik, dimana pencapaian kinerja lebih dari 100% sedangkan anggaran terserap 98,87%, pelaksanaan kinerja BPKPD tahun 2021 telah ditempuh dengan efektif dan efisien. Capaian strategi Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah dengan indikator yaitu persentase pertumbuhan pajak daerah sangat baik, mencapai >100% yaitu 159,63%. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian kinerja sasaran yang paling baik dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran lainnya. Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai pencapaian tahun pelaporan (2021). Namun dikarenakan tahun 2021

merupakan tahun awal dari Rencana Strategis 2021-2026 sehingga belum ada perbandingan yang menunjukkan kenaikan/penurunan capaian kinerja tahunan. Secara umum, nampak bahwa Capaian kinerja Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sasaran mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel dan mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel secara umum sudah masuk pada kategori sangat baik.

Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 196810081988031 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Nilai Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	-	Nilai	-	B	B	B	B (67)	BB (76)		

Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59,06	66,489	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	76	81	83	85	87
											Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100

											Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-------	------	------	------	------	------	------

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : NOVEMBER 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH TASIKMALAYA, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,



Drs. RAHAYU JANNAT A, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005